



Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Keluarga Harapan (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe)

Strategies for Improving Social Welfare Through The Family Hope Program (Study at the Konawe Regency Social Services Office)

Junarty Iswari¹, Jabal Arfah², Jefry Crisbiantoro³

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lakidende Unaaha

Email Koresponden: nina.sidoardjo91@gmail.com¹, jabalarfah87.ja@gmail.com², jefrycs067@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 02-08-2026

Revised : 04-08-2026

Accepted : 06-08-2026

Published: 08-08-2026

Abstract

This study aims to analyze the strategy for improving social welfare through the Program Keluarga Harapan (PKH) at the Dinas Sosial Kabupaten Konawe and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. The study is motivated by the relatively high poverty rate and the large number of Beneficiary Families (KPM) in Konawe Regency, indicating the need for an effective strategy in implementing the program. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Informants were selected purposively and consisted of officials from the Social Affairs Office, PKH facilitators, and beneficiary families. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings reveal that the implementation strategy of PKH has been properly planned and carried out in accordance with established guidelines, reflecting Mintzberg's strategic dimensions (plan, pattern, position, perspective, and ploy). The strategy has contributed to improving access to education and health services for beneficiary families, although economic independence has not yet been fully achieved. Supporting factors include local government commitment, the active role of facilitators, and cross-sector collaboration. Meanwhile, inhibiting factors consist of limited facilitators, data inaccuracies, technical distribution issues, and geographical challenges.

Keywords: Strategy, Social Welfare, Program Keluarga Harapan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan kesejahteraan sosial melalui Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka kemiskinan dan banyaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Konawe sehingga diperlukan strategi yang efektif dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan ditentukan secara purposive, terdiri atas unsur Dinas Sosial, pendamping PKH, dan KPM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan PKH telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku, mencerminkan dimensi strategi Mintzberg (plan, pattern, position, perspective, dan ploy). Strategi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan KPM, meskipun kemandirian ekonomi belum optimal. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah daerah, peran pendamping, dan kerja sama lintas sektor, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan pendamping, permasalahan data, kendala teknis, serta kondisi geografis wilayah.

Kata Kunci: Strategi, Kesejahteraan Sosial, Program Keluarga Harapan



PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial utama yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan sosial. Kondisi ini berdampak langsung terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya pada kelompok keluarga miskin dan rentan. Kesejahteraan sosial sendiri merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar individu dan keluarga agar dapat hidup layak serta mampu menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Idealnya bahwa Program Keluarga Harapan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat kesenjangan antara harapan tersebut dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Sebagian keluarga penerima manfaat memang mengalami peningkatan dalam akses pendidikan dan kesehatan, tetapi belum semuanya mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian yang mengkaji lebih mendalam mengenai strategi Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kualitas kesejahteraan sosial, khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai pelaksana utama di tingkat daerah.

Kondisi ini mencerminkan bahwa banyak keluarga masih mengalami keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan dan kebutuhan sosial lainnya. Situasi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan menghambat terwujudnya kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Upaya dalam merespon masalah kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat, pemerintah melaksanakan kebijakan perlindungan dan bantuan sosial. Salah satu program unggulan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang dirancang sebagai program bantuan bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan. Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tetapi juga mensyaratkan penerima manfaat untuk meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan bagi anak-anak, serta layanan kesehatan bagi ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya (Kementrian Sosial RI, 2018) Dengan demikian, Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia dan memutus siklus kemiskinan antar generasi.

Kondisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Konawe masih menunjukkan tantangan serius. Berdasarkan data dari instansi terkait, pada tahun 2022 jumlah penerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Konawe tercatat sekitar 17.000 keluarga penerima manfaat (KPM), sementara tambahan penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) sebanyak sekitar 13.000 KPM, sehingga total penerima bantuan sosial melalui PKH + BPNT mencapai sekitar 30.000 KPM. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi sosial melalui PKH memang telah merata menjangkau banyak keluarga di Konawe, menandakan bahwa program ini menjadi alat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga kurang mampu.

Namun demikian, fakta bahwa puluhan ribu keluarga memerlukan bantuan menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga di Konawe menghadapi keterbatasan signifikan terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini memperkuat premis bahwa



kebijakan perlindungan dan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) bukan saja relevan, tetapi juga penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan memutus siklus kemiskinan di Kabupaten Konawe. Pertimbangan kondisi kemiskinan di tingkat daerah, peran pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), tantangan implementasi, dan pentingnya pelaksanaan di tingkat Dinas Sosial, maka penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi secara empiris: strategi Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang kesenjangan antara harapan kebijakan dan realitas di lapangan, serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang diteliti melalui pengumpulan data berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai strategi Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri atas; (1) Kepala Dinas Sosial Sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan; (2) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Sebagai pengelola teknis PKH; (3) Koordinator Pendamping PKH Sebagai pengawas lapangan pelaksanaan PKH; (4) Pendamping Sosial PKH Sebagai pelaksana pendampingan langsung kepada KPM; (5) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sebagai penerima langsung program PKH. Jumlah informan bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai titik jenuh (saturation).

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dan Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari dokumen dan literatur.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dapat terkumpul melalui 3 (tiga) teknik yaitu:

1. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung.
2. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam (in-depth interview) kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai, Strategi Dinas Sosial dalam PKH, Mekanisme pelaksanaan PKH, Dampak PKH terhadap kesejahteraan sosial, dan Kendala serta upaya penyelesaiannya.



3. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa: Foto kegiatan PKH, Data jumlah penerima PKH, Laporan pendampingan, dan Dokumen resmi Dinas Sosial.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari; (1) Reduksi Data Merangkum, memilih hal-hal pokok, serta memfokuskan data sesuai dengan tujuan penelitian; (2) Penyajian Data : Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan agar mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang mengatur kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan bantuan sosial kepada fakir miskin sebagai bentuk perlindungan dan jaminan sosial.

Secara teknis operasional, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan ini mengatur tujuan, sasaran penerima manfaat, komponen bantuan, hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta mekanisme pelaksanaan dan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun mekanisme penyaluran bantuan secara non tunai mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, yang mengatur sistem penyaluran bantuan sosial melalui lembaga perbankan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum tersebut menjadi dasar legitimasi dalam menjalankan program, mulai dari proses pendataan, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran bantuan, hingga pendampingan sosial kepada masyarakat penerima manfaat.

Rencana (*Plan*)

Rencana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahap awal dalam implementasi strategi peningkatan kesejahteraan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Perencanaan strategis Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Konawe dilaksanakan secara terstruktur setiap tahun anggaran oleh Dinas Sosial. Perencanaan ini menjadi tahapan awal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan tersebut meliputi pemutakhiran data masyarakat miskin melalui mekanisme pembaruan desil, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, penyusunan rencana kerja tahunan, serta sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran serta mendukung efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.



Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti di Dinas Sosial Kabupaten Konawe, diketahui bahwa pada awal tahun anggaran dilaksanakan rapat koordinasi internal bersama Koordinator PKH dan para pendamping. Dalam rapat tersebut dibahas hasil evaluasi pelaksanaan PKH tahun sebelumnya, termasuk kendala dalam proses penyaluran bantuan dan tingkat kepatuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap komitmen pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, peneliti juga mengamati adanya proses pemutakhiran data yang dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data KPM sesuai dengan kondisi riil masyarakat, terutama dalam pembaruan desil sebagai dasar penetapan kelayakan penerima bantuan. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis dalam menjaga validitas data penerima manfaat.

Pertama, aspek manajerial, yakni perencanaan teknis operasional melalui rapat koordinasi awal tahun. Rapat tersebut menjadi instrumen evaluasi sekaligus perumusan rencana kerja tahunan, termasuk pembagian wilayah dampingan dan penetapan target kepatuhan KPM.

Kedua, aspek administratif, yaitu sinkronisasi dengan Renja Dinas Sosial dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan PKH telah terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan tidak berjalan secara terpisah. Dengan demikian, perencanaan strategis PKH tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap kondisi lapangan serta selaras dengan kebijakan pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Konawe dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan berkesinambungan setiap tahun anggaran. Proses perencanaan tersebut meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan program pada periode sebelumnya, pemutakhiran data melalui mekanisme pembaruan desil, penyusunan rencana kerja tahunan, serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan daerah.

Rangkaian langkah tersebut mencerminkan komitmen Dinas Sosial dalam mengoptimalkan pelaksanaan program agar berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Konawe.

Pola Tindakan (*Pattern*)

Pola tindakan dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe diwujudkan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Konawe memperlihatkan adanya pola tindakan yang dilaksanakan secara berulang dan telah menjadi rutinitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan program. Pola tersebut terbentuk melalui proses perencanaan yang dilakukan setiap tahun, pelaksanaan kegiatan pendampingan di lapangan secara berkala, serta penerapan prosedur dan ketentuan yang mengacu pada regulasi nasional.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, peneliti mendapati bahwa pada awal tahun anggaran diselenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Sosial, Koordinator PKH, serta



para pendamping. Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dan penyusunan rencana kerja untuk tahun berjalan.

Di tingkat operasional, peneliti juga mengamati pelaksanaan pertemuan kelompok secara rutin antara pendamping dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dalam pertemuan tersebut, pendamping menyampaikan materi edukasi sekaligus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan KPM dalam memenuhi komitmen di bidang pendidikan dan kesehatan.

Hasil observasi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan dengan pola kerja yang sistematis, terencana, dan dilakukan secara berulang pada setiap periode pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator PKH, Pendamping PKH, serta Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Konawe memperlihatkan adanya pola tindakan yang tersusun secara sistematis dan dilaksanakan secara berulang setiap tahun.

Keterangan dari Koordinator PKH menunjukkan adanya pola manajerial yang terencana dengan baik dalam pelaksanaan program. Proses yang diawali dengan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja serta pembagian wilayah dampingan, menandakan bahwa pelaksanaan PKH mengikuti alur perencanaan yang terstruktur. Kebiasaan ini menggambarkan bahwa program dijalankan berdasarkan mekanisme kerja yang telah tertata dan menjadi agenda rutin pada awal tahun anggaran.

Di sisi lain, penjelasan dari Pendamping PKH menggambarkan adanya pola operasional yang berlangsung di lapangan. Kegiatan pertemuan kelompok secara rutin bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyampaian materi edukasi, serta pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban pendidikan dan kesehatan menunjukkan bahwa implementasi PKH memiliki jadwal kegiatan yang tetap dan dilaksanakan secara berkala. Hal ini menegaskan bahwa peran pendamping tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan dan pengawasan sosial.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Konawe menunjukkan adanya pola tindakan yang tersusun secara terencana, sistematis, dan berlangsung secara berkesinambungan.

Pola tersebut tampak dalam tiga dimensi utama, yakni dimensi manajerial melalui kegiatan koordinasi, evaluasi, dan perencanaan tahunan; dimensi operasional melalui pelaksanaan pertemuan rutin, pemberian edukasi, serta pemantauan kepatuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM); serta dimensi normatif-prosedural yang berpedoman pada regulasi dan ketentuan nasional.

Dengan demikian, implementasi PKH di Kabupaten Konawe tidak dilaksanakan secara spontan atau sementara, melainkan mengikuti alur kerja yang konsisten dan telah menjadi bagian dari sistem pelaksanaan program. Pola tindakan ini berperan penting dalam menunjang efektivitas program guna mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Posisi (*Position*)

Posisi dalam penelitian ini menguraikan tentang kedudukan serta peranan para aktor pelaksana dalam struktur implementasi kebijakan, khususnya pada pelaksanaan Program Keluarga



Harapan di Kabupaten Konawe. Posisi tersebut memperlihatkan pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta pola hubungan koordinasi antar unsur pelaksana program, yang meliputi Dinas Sosial, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pada tingkat kecamatan dan desa. Dalam struktur organisasi, Koordinator tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab pengendalian teknis program. Peran tersebut mencakup koordinasi kerja pendamping, penyampaian arahan kebijakan, serta pelaporan perkembangan dan kendala pelaksanaan program kepada pimpinan. Dengan demikian, posisi Koordinator berada pada level manajerial menengah yang menjembatani kepentingan struktural dan operasional.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Konawe, Koordinator PKH tampak berperan aktif dalam rapat koordinasi yang melibatkan Kepala Bidang dan para pendamping. Dalam forum tersebut, Koordinator memberikan petunjuk teknis kepada pendamping sekaligus menerima laporan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa setiap laporan kegiatan dari pendamping terlebih dahulu disampaikan kepada Koordinator sebelum diteruskan kepada Kepala Bidang. Temuan ini mengindikasikan adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), di mana Koordinator berfungsi sebagai penghubung formal antara level kebijakan dan pelaksana teknis di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa kedudukan Koordinator dalam struktur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Konawe berada pada level koordinasi dan pengendalian teknis di bawah Dinas Sosial, khususnya pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Koordinator memegang peranan penting sebagai penghubung antara kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Sosial dengan pelaksanaan teknis oleh pendamping di lapangan. Secara hierarkis, Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, sedangkan secara fungsional bertugas mengoordinasikan pendamping, memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman nasional, serta melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan program.

Dengan demikian, posisi Koordinator memiliki peran yang strategis dalam menjaga keselarasan antara kebijakan dan implementasi program, sehingga pelaksanaan PKH di Kabupaten Konawe dapat berlangsung secara terkoordinasi, sistematis, dan efektif.

Perspektif (*perspective*)

Perspective dalam penelitian ini menguraikan bagaimana pola pikir serta pemahaman pelaksana program memengaruhi sikap, perilaku, dan cara mereka melaksanakan tugas di lapangan. Dalam implementasi Program Keluarga Harapan, perspektif pendamping memegang peranan penting karena menentukan metode dan pendekatan yang digunakan dalam mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Peran pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Konawe dipandang sebagai elemen strategis yang sangat menentukan efektivitas program. Pendamping tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga berfungsi sebagai



penghubung utama antara kebijakan pemerintah dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pandangan ini tercermin dari keterangan para informan yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program sangat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi, proses pembinaan, serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendamping.

Di tingkat lapangan, pendamping menjalankan peran aktif dalam memastikan KPM memenuhi komitmen di bidang pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya diukur dari kelancaran pencairan bantuan, melainkan juga dari adanya perubahan pola pikir dan perilaku KPM, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan anak serta pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan demikian, pendamping berperan sebagai agen perubahan sosial yang mendorong tercapainya tujuan program secara lebih substansial.

Berdasarkan observasi peneliti pada kegiatan pertemuan kelompok, pendamping terlihat aktif memberikan edukasi, mengingatkan kewajiban KPM, serta menjelaskan informasi terkait jadwal pencairan bantuan. Interaksi antara pendamping dan KPM berlangsung komunikatif dan persuasif.

Peneliti juga mengamati bahwa pendamping melakukan pengecekan kehadiran sekolah anak dan memastikan KPM memahami kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa pendamping tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sosial secara langsung.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada kegiatan pertemuan kelompok PKH di Kecamatan Wawotobi, terlihat pendamping memimpin diskusi bersama KPM dalam suasana yang komunikatif dan partisipatif. Pertemuan dilaksanakan di rumah salah satu KPM dengan posisi duduk melingkar, yang menunjukkan pendekatan kekeluargaan dan partisipatif dalam proses pendampingan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran pendamping memiliki tiga dimensi utama yang saling berkaitan. Pertama, dimensi edukatif, yaitu peran pendamping dalam memberikan pemahaman, sosialisasi, dan pembinaan kepada KPM. Kedua, dimensi pengawasan, yakni memastikan KPM memenuhi komitmen pendidikan dan kesehatan sesuai ketentuan program. Ketiga, dimensi motivasional, yaitu mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kesadaran KPM agar lebih mandiri dan bertanggung jawab.

Ketiga dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan program. Dengan demikian, peran pendamping dapat dikatakan sebagai faktor strategis dalam mendukung tercapainya tujuan PKH secara optimal di tingkat lapangan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Konawe sangat strategis dan menjadi penentu keberhasilan program. Pendamping berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan, yang menghubungkan kebijakan program dengan kondisi sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lapangan.

Keberhasilan PKH tidak semata-mata bergantung pada kebijakan atau penyaluran bantuan, melainkan juga pada kualitas pendampingan yang diberikan, yang mencakup pembinaan, pengawasan, serta komunikasi yang berkesinambungan. Dengan demikian, pendamping memegang



peran sentral dalam mendorong kepatuhan KPM dan perubahan perilaku, sehingga tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dapat tercapai secara efektif dan optimal.

Ploy (*Manuver*)

Ploy (manuver) dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya strategis dan pendekatan persuasif yang diterapkan oleh pendamping dalam menangani berbagai kendala sekaligus mengarahkan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar implementasi program berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Konawe dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti keterlambatan pencairan bantuan, bantuan yang tidak cair, maupun ketidaksesuaian data penerima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika menghadapi permasalahan tersebut, KPM umumnya mengandalkan pendamping PKH sebagai pihak yang membantu dan menjembatani penyelesaian masalah.

Pendamping berperan tidak hanya sebagai penghubung antara KPM dan Dinas Sosial, tetapi juga secara aktif melakukan tindak lanjut atas laporan yang diterima, memverifikasi dokumen, serta memastikan proses penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan. Di sisi lain, Koordinator PKH turut memperkuat proses ini melalui fungsi pengawasan dan koordinasi lanjutan dengan Dinas Sosial. Pola hubungan ini menunjukkan adanya strategi atau ploy yang terstruktur dalam menangani kendala, di mana setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme koordinasi yang jelas sehingga pelaksanaan program tetap berlangsung secara efektif.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, terlihat bahwa setiap kali Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menghadapi kendala terkait bantuan PKH, mereka segera menghubungi pendamping untuk memperoleh bantuan. Pendamping kemudian melakukan verifikasi data, mengecek dokumen terkait, serta berkoordinasi dengan Koordinator PKH untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Selanjutnya, Koordinator memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pendamping, berkoordinasi dengan Dinas Sosial, dan memastikan bahwa perbaikan data atau pencairan bantuan dapat dilakukan secara cepat. Interaksi antara KPM, pendamping, dan koordinator berlangsung secara komunikatif dan persuasif, yang menunjukkan bahwa proses penyelesaian masalah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung unsur edukatif dan fasilitatif, sehingga KPM mendapatkan pemahaman dan dukungan yang memadai dalam memenuhi hak mereka.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH berperan penting sebagai mediator yang menghubungkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan Dinas Sosial. Pendamping tidak hanya menindaklanjuti masalah yang dihadapi KPM, tetapi juga memastikan setiap kendala dapat diselesaikan melalui koordinasi yang tepat dan efektif.

Sementara itu, Koordinator PKH berperan mengawasi serta mendukung tindakan pendamping agar penyelesaian masalah berlangsung sesuai prosedur yang berlaku. Mekanisme ini menunjukkan adanya strategi atau ploy yang terstruktur, komunikatif, dan bersifat edukatif, sehingga setiap kendala bantuan PKH dapat ditangani secara efektif.



Dengan diterapkannya jalur koordinasi yang jelas dan berlapis, kepuasan KPM tetap terjaga, sekaligus memastikan bahwa tujuan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dapat tercapai secara optimal.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Konawe mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah daerah melalui Dinas Sosial. Dukungan ini tercermin dalam kebijakan, koordinasi, dan penyelenggaraan kegiatan yang berkesinambungan. Pemerintah daerah tidak hanya memberikan arahan teknis, tetapi juga menyediakan sumber daya serta mekanisme pendukung untuk memastikan program berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan terstruktur. Bentuk komitmen tersebut meliputi perencanaan tahunan, pemutakhiran data masyarakat miskin, penyediaan pendamping, pembagian wilayah kerja, serta pengawasan pelaksanaan program di lapangan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, Dinas Sosial Kabupaten Konawe secara berkala menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan Kepala Bidang, Koordinator PKH, dan pendamping. Kegiatan rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pada tahun sebelumnya serta menyusun rencana kerja tahunan secara sistematis.

Selain itu, terdapat mekanisme pemutakhiran data masyarakat miskin melalui proses pembaruan desil, yang dilakukan secara kolaboratif antara pendamping dan pemerintah desa. Mekanisme ini memastikan bahwa data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap valid sehingga bantuan sosial dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.

Pendamping menerima arahan teknis serta supervisi dari Koordinator PKH, yang menunjukkan adanya jalur koordinasi yang jelas dan berlapis antara pemerintah daerah, Koordinator, dan pelaksana di lapangan. Jalur koordinasi ini memungkinkan program dijalankan secara efektif dan sesuai pedoman yang berlaku.

Selain itu, dukungan pemerintah daerah juga terlihat dari tersedianya fasilitas pendukung, seperti kantor operasional, kendaraan dinas, dan sarana komunikasi, yang disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Konawe.

Analisis data menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah dapat dilihat melalui empat aspek utama. Pertama, aspek kebijakan dan regulasi yang memberikan pedoman pelaksanaan PKH sesuai standar nasional. Kedua, aspek koordinasi dan supervisi yang menjamin pelaksanaan program terstruktur, terkontrol, dan sesuai arahan. Ketiga, aspek fasilitas dan sumber daya yang mendukung operasional pendamping dan Koordinator. Keempat, aspek pemutakhiran data yang menjaga akurasi dan ketepatan sasaran bantuan.

Dengan demikian, komitmen pemerintah daerah Kabupaten Konawe bersifat menyeluruh dan berlapis. Dukungan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, dan monitoring lapangan, didukung oleh sumber daya aset yang memadai, menjadikan pelaksanaan PKH lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan peran sentral pemerintah daerah dalam memastikan keberhasilan PKH sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Konawe.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Keterbatasan jumlah pendamping PKH di Kabupaten Konawe merupakan salah satu hambatan signifikan dalam pelaksanaan program. Pendamping yang menangani banyak KPM



sekaligus menghadapi kesulitan dalam melakukan kunjungan rutin, pendampingan secara individual, serta monitoring di lapangan. Akibatnya, sebagian KPM tidak mendapatkan arahan atau pengawasan secara maksimal, yang berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data dan rendahnya pemahaman KPM terhadap program.

Hasil pengamatan peneliti di lapangan mengindikasikan bahwa pendamping sering kali harus membagi waktu antara beberapa wilayah atau kelompok KPM. Akibatnya, pertemuan kelompok rutin kadang tertunda, dan kunjungan ke rumah KPM tidak selalu berjalan sesuai jadwal. Kondisi ini memengaruhi frekuensi interaksi antara pendamping dan KPM serta membatasi kesempatan untuk melakukan pembinaan individual secara lebih mendalam.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan jumlah pendamping PKH menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan program di Kabupaten Konawe. Situasi ini berdampak pada kualitas pendampingan, efektivitas monitoring, serta kecepatan penyelesaian masalah di lapangan. Oleh karena itu, penambahan jumlah pendamping atau pengaturan distribusi wilayah kerja yang lebih efisien perlu dipertimbangkan sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH, memastikan KPM mendapatkan arahan dan pengawasan secara optimal, serta mendukung tercapainya tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Permasalahan pendataan merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) karena berdampak langsung pada ketepatan sasaran penerima bantuan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain melalui verifikasi dan validasi data di lapangan, pelaksanaan musyawarah desa, penguatan koordinasi dengan pemerintah desa, serta pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan utama. Namun demikian, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung dinamis serta adanya keterbatasan dalam proses administratif menyebabkan persoalan pendataan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pelaksanaan PKH yang efektif dan tepat sasaran.

Tingkat pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap tujuan dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum dapat dikatakan cukup baik, namun belum sepenuhnya merata. Sebagian KPM telah memahami bahwa PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang difokuskan pada dukungan pendidikan anak dan peningkatan kesehatan keluarga. Namun demikian, masih ada KPM yang pada awalnya memandang PKH semata-mata sebagai bantuan uang tunai tanpa memahami kewajiban serta tujuan jangka panjang dari program tersebut. Variasi tingkat pemahaman ini menunjukkan bahwa walaupun sosialisasi telah dilaksanakan, belum seluruh KPM memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai PKH sebagai program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terlihat aktif mengikuti pertemuan kelompok dan mampu menguraikan kembali kewajiban mereka terkait aspek pendidikan dan kesehatan dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Namun demikian, masih terdapat KPM yang kurang berpartisipasi dalam diskusi dan cenderung lebih memperhatikan jadwal pencairan bantuan. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman di antara KPM, yang dipengaruhi oleh frekuensi kehadiran dalam pertemuan, latar



belakang pendidikan, serta kemampuan dalam menyerap informasi yang disampaikan oleh pendamping.

KESIMPULAN

Pelaksanaan PKH memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan, kesadaran akan pentingnya kesehatan, serta berkurangnya beban ekonomi rumah tangga miskin. Meskipun demikian, tingkat kemandirian ekonomi KPM masih belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan upaya penguatan melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Keberhasilan implementasi strategi ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, keterlibatan aktif pendamping PKH dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada KPM, terjalinnya kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait, seperti bidang pendidikan dan kesehatan, partisipasi KPM dalam mengikuti kegiatan pendampingan dan memenuhi kewajiban program. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH di lapangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi optimalisasi strategi, di antaranya: jumlah pendamping PKH yang masih terbatas dan belum sebanding dengan jumlah KPM serta luas wilayah, permasalahan akurasi data penerima manfaat yang memerlukan pembaruan secara berkala, rendahnya tingkat pemahaman sebagian KPM terhadap tujuan program sehingga berdampak pada belum optimalnya perubahan perilaku, kendala teknis dalam proses penyaluran bantuan, serta kondisi geografis wilayah Kabupaten Konawe yang luas dan beragam, sehingga menyulitkan proses pendampingan dan pengawasan.

Secara keseluruhan, strategi peningkatan kesejahteraan sosial melalui PKH di Kabupaten Konawe telah menunjukkan hasil yang cukup efektif serta memberikan dampak yang positif. Akan tetapi, masih diperlukan penguatan pada aspek pemutakhiran data, peningkatan kualitas pendampingan, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi agar tujuan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chandler, A. D. (1962). *Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise*. Cambridge: MIT Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David, F. R. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases*. New Jersey: Pearson Education.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.



- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- Meter, D. S. V., & Horn, C. E. V. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. New York: Elsevier.
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona: Sage Publications
- Siagian, S. P. (2004). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, E. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- TNP2K. (2018). *Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy*. New Jersey: Pearson Education.